

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Rangka Peningkatan Hasil Belajar

Evaluation of The Implementation of The Merdeka Belajar Curriculum Policy in Order to Improve Learning Outcomes

**Djoko Siswanto Muhartono¹, Sri Wahyuni², Sri Umiyati³, Ade Wahyuni Azhar⁴, Irma Irawati
puspaningrum⁵**

¹Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

²Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

³Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

⁴APP APIPSU Medan

⁵Universitas Wiraraja, Sumenep, Indonesia

*E-mail: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id; sri.wahyuni@hangtuah.ac.id; sri.umiyati@hangtuah.ac.id;
adewazhar@gmail.com; irma@wiraraja.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan pasca Covid-19 yang lalu yang mana dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran atau yang dikenal dengan "kurikulum merdeka belajar." Beberapa penelitian yang sejenis yang berupaya untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar. Namun penelitian ini agak berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini ditinjau dari variabel efektifitas program dari Budiani. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe riset studi permasalahan, serta yang menjadi informan adalah: kepala dan wakil kepala sekolah di SDN Wonorejo 274 Surabaya, siswa dan orang tua siswa. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal, yaitu: (1) sasaran program relatif belum tercapai secara penuh, namun telah merubah perilaku para aktor pemangku kepentingan; (2) pelaksanaan sosialisasi program telah menyampaikan kebijakan kurikulum merdeka belajar secara efektif; (3) pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka belajar telah ditetapkan oleh pihak sekolah tentang tujuan program dalam bentuk Buku Panduan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar; (4) pemantauan terhadap pelaksanaan dilakukan secara periodik setiap tri wulan atau tiga bulan sekali, bersamaan dengan persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Hasil pemantauan ini telah dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program kurikulum merdeka belajar.

Kata kunci: evaluasi, kurikulum merdeka belajar, hasil belajar

ABSTRACT

ABSTRACT This research was conducted to answer the problem of the implementation of the last post-Covid-19 Education policy which was with the issuance of the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 56 of 2022 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in the Framework of Learning Recovery or known as the "independent learning curriculum." Several similar studies attempt to determine the impact of the policy of implementing an independent learning curriculum in elementary schools. However, this study is somewhat different from previous research because this study is reviewed from the variable effectiveness of Budiani's program. This research uses a qualitative approach with the type of case study research, and the informants are: the principal and vice principal at SDN Wonorejo 274 Surabaya, students and parents. From the results of this study, several things were found, namely: (1) the program objectives have not been fully achieved, but have changed the behavior of stakeholder actors; (2) the implementation of program socialization has conveyed the independent learning curriculum policy effectively; (3) the implementation of the Independent Learning Curriculum policy has been determined by the school regarding the objectives of the program in the form of a Guidebook for the Implementation of the Free Learning Curriculum; (4) Monitoring of the implementation shall be carried out periodically every quarter or every three months, along with preparation for the implementation of school examinations. The results of this monitoring have been used as evaluation material for the implementation of the independent learning curriculum program.

Keywords: *evaluation, merdeka belajar curriculum, learning outcomes*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan dalam sesudah Endemi Covid 19, Pemerintah melewati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi sudah diterbitkan ialah” Merdeka Belajar,” di dasar Pendidikan. Ketetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, bawah Kepmendikbudristek No 56 Tahun 2022(Kemendikbudristek Nomor. 56/ 2022) mengenai Prinsip Aplikasi Kurikulum Pada Bagan perbaikan Kegiatan belajar mengajar ataupun yang diketahui dengan” kurikulum merdeka belajar.” Pada peraturan kurikulum merdeka belajar itu sudah ditetapkan 4 utama kebijakan pendidikan guna menaikkan sumber daya manusia(SDM), 4 pokok kebijakan pendidikan yang terdiri dari:(1) Tes Sekolah Berstandar Nasional(USBN);(2) Tes Nasional(UN); (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP);(4) serta Peraturan Penerapan Peserta Didik Baru(PPDB) Zonasi. Kegiatan serupa antara pengelola kebutuhan butuh ditingkatkan. Perihal ini terkait dengan kesiapan pendidikan yang jadi salah satu penopang penting kesuksesan kebijakan merdeka belajar. Tetapi demikian, menurut hasil riset(Dewi & Astuti, 2022) di Sekolah Dasar Apuan, Provinsi Bali sudah terdapat temuan jika baik guru serta murid relatif belum siap untuk menjalankan kurikulum merdeka

Permasalahan implementasi kurikulum 2013:(1) Kerap bergantinya regulasi serta perbaikan peraturan yang kesekian, belum meratanya training pada guru, belum lengkapnya media serta infrastruktur, buku pegangan guru serta buku pegangan peserta didik, pergantian adat objektif, aktivitas literasi sekolah serta pengawasan dalam belum maksimal;(2) Belum seluruh guru turut pelatihan, guru belum menguasai akar Kurikulum Merdeka, guru sedang kesusahan pada mengatur RPP, serta menjalankan dengan bentuk kegiatan belajar mengajar yang cocok pendekatan alamiah, literasi pada kegiatan belajar mengajar serta standar evaluasi

sedang dirasa susah serta kompleks oleh guru;(3) Permasalahan yang dialami peserta didik ialah peserta didik mayoritas dari keluarga menengah ke dasar dengan dorongan belajar dari orang berumur yang kurang. Peserta didik terbiasa pasif mencermati uraian guru, memerlukan durasi untuk jadi aktif berburu serta menekuni modul. Bobot berlatih peserta didik meningkat dari 46 jam jadi 50 jam berlatih pada sepekan membuat peserta didik jadi bosan. Buku pegangan peserta didik jumlahnya sedang kurang serta buku basis berlatih yang lain jumlahnya sedang terbatas, menghasilkan cara KBM kurang dapat maksimal (Dewi & Astuti, 2022).

Hasil riset lain membuktikan jika metode kegiatan belajar mengajar PAI lebih menekankan dalam peserta didik supaya lebih aktif didalam cara kegiatan belajar mengajar serta guru hanya sebagai penyedia, Guru serta peserta didik pada melakukan kegiatan belajar mengajar di kategori menekankan pentingnya akan misi materi, kemerdekaan, serta aplikasi dalam kehidupan sehari- hari. Penerapan penilaian pengajaran PAI pada Kurikulum Merdeka Belajar Kelas X di SMA Negeri 4 Kota Bima sebagian besarnya sedang memakai penilaian dalam kurikulum lebih dahulu (Muamar et al., 2022).

Peneliti menyarankan agar guru tetap bisa berkreasi dan berinovasi meski dengan sarana dan prasarana yang terbatas karena kebijakan pengembangan kurikulum mandiri saat ini menyiratkan bahwa guru mampu mengajar dengan bebas. dengan mengoptimalkan kemampuan diri sendiri dan mampu berkreasi tanpa batas sehingga mampu menggali dan menggali kemampuan peserta didik sehingga dapat mengatasi dan memecahkan permasalahan kehidupan serta mampu bersaing dan eksis di dunia kerja nantinya (Nasution & Syukri, 2022).

Hasil dari riset ini membuktikan jika pengimplementasian kebijakan merdeka belajar bisa dilakukan dengan belalui peningkatkan kualitas pendidikan, metode kegiatan belajar mengajar, komitmen dari guru, dorongan dari kepala sekolah, serta kurikulum Pendidikan (Sari, 2019).

Riset lain dijumpai terdapatnya kurikulum merdeka yang jadi referensi di sekolah pengagas, yang membuahkan peserta didik yang bermoral terpuji, mandiri, berpikir kritis, inovatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah pelopor mendorong bermacam macam program partisipatif, istimewa, serta banyak inovasi. membangun kegiatan serupa dengan guru- guru yang menunjang pemimpinya ikut serta pada menciptakan sekolah pelopor (Sumarsih et al., 2022).

Sedangkan efektivitas program penanggulangan pengangguran ini dapat dilihat dari variabel-variabel sebagai berikut: (1) Ketepatan Sasaran Program; (2) Sosialisasi Program; (3) Tujuan Program; dan (4) Pemantauan (Budiani, 2007). Secara lebih terinci variabel efektivitas program di atas, dapat juga dipergunakan sebagai evaluasi alat analisis dan pembahasan hasil dari penelitian ini, yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program untuk mensosialisasikan program, sedemikian rupa sehingga informasi pelaksanaan program sampai kepada masyarakat luas dan khususnya peserta sasaran program.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah konsistensi antara realisasi hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, agar sasaran dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan (Budiani, 2007).

Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, agar tidak dapat menimbulkan permasalahan dalam proses belajar mengajar. Kebijakan kurikulum merdeka belajar perlu dievaluasi karena untuk menghindari salah dalam penerapan dan dapat diperbaiki dalam pelaksanaannya, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan berkualitas. Pendidikan berkualitas menjadi tujuan utama sebagaimana hal ini merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan keempat dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Oleh karena itu, pembahasan dari hasil penelitian akan diukur dengan teori efektivitas program

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Argumentasi pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yang relatif baru, ternyata telah menimbulkan salah persepsi antara kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa. Dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana dampak dari pelaksanaan kurikulum merdeka ini, perlu melakukan penelitian di salah satu satuan pendidikan yang dalam hal ini adalah di SDN Wonorejo 274 Surabaya sebagai sebuah kasus yang spesifik atau unik. Studi kasus ini untuk menyelidiki dan memahami pelaksanaan kurikulum merdeka yang berdasarkan kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam Kemendikbudristek No. 56/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Dengan demikian hasil studi kasus terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dapat digunakan sebagai evaluasi dan mencari solusi agar tidak salah persepsi antar aktor pemangku kepentingan di satuan pendidikan. Oleh karena sebagai unit analisis, cara riset dengan pendekatan kualitatif serta tipe riset studi permasalahan ini dicoba kepada informan semacam: (1) Kepala Sekolah SDN Wonorejo 274 Surabaya; (2) Koordinator di bidang kurikulum; (3) Guru-guru SDN Wonorejo 274 Surabaya; dan (4) Wali murid SDN Wonorejo 274 Surabaya.

Fokus penelitian ini mengacu pada pelaksanaan kebijakan Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022, yaitu: (1) standar, tujuan dan kegiatan; (2) Sumber Daya; (3) Komunikasi; (4) Karakteristik Lembaga; (5) Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi. Sedangkan sumber informasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, siswa dan orang tua siswa sebagai data primer dan dokumen yang ada di sekolah merupakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dengan instrumen: pedoman wawancara, observasi, dan dokumenter. Teknik analisis data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-14). Empat komponen alat analisis data tersebut, meliputi: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Analisis data ini secara bersamaan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022, apabila ditinjau dari perspektif teori Van mater Van Horn, adalah sebagai berikut:

1) Standar, Tujuan dan Kegiatan

Tujuan dari adanya kebijakan kurikulum merdeka belajar untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali potensi terbesar para pengajar di sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya pada manusia baik dari aspek kualitas maupun keterampilan para guru dan orang tua. Sedangkan sumber daya sarana dan

prasarana yang disediakan oleh pemerintah dipergunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

3) Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan adalah penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan, sosialisasi dan komunikasi serta konsisten dan stabil mengenai ketepatan/akurasi antar pelaksana kebijakan di lapangan.

4) Karakteristik Lembaga

Karakteristiki Lembaga ini terkait dengan struktur organisasi yang bertugas untuk mengontrol secara tingkatan hirarki ke pelaksana kebijakan, dan kompetensi para pelaksana.

5) Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi orang tua, mengenai dukungan elit politik, sikap pelaksanaan terhadap respon bantuan dari pelaksana. Kinerja tercapainya tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan guna untuk menyempurnakan atau merevisi kebijakan sebelumnya.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran sebagaimana terlampir yang berhubungan dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah. sebutan tambahan itu merupakan:(1) Kurikulum Merdeka pada PAUD, Dikdas, serta Dikmen;(2) Pemenuhan beban kerja serta penyusunan linieritas guru bersertifikat pengajar pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam kurikulum merdeka.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan kegiatan belajar mengajar intrakurikuler yang beraneka ragam dimana konten akan lebih maksimal supaya peserta didik mempunyai cukup durasi buat menguasai rancangan serta memantapkan kompetensi. Guru mempunyai kebebasan buat memilah bermacam alat serta materi didik alhasil kegiatan belajar mengajar bisa diselaraskan dengan kepentingan belajar serta atensi peserta didik. Pada Kurikulum Merdeka, mata pelajaran Ilmu Wawasan Alam serta Social(IPAS), dengan tujuan bisa menyebabkan anak untuk bisa mengatur area alam serta sosial pada satu kesatuan. Penerapan Kurikulum Merdeka begitu juga diartikan pada diktum kedua diberlakukan dengan cara berangsur- angsur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tahun awal dilaksanakan untuk peserta didik dengan umur 5(lima) hingga dengan 6(enam) tahun dalam pendidikan anak usia dini, dan peserta didik kelas I, kelas IV, kelas VII, serta kelas X dalam tahapan pendidikan dasar serta pendidikan menengah;

2) Tahun kedua dilaksanakan untuk peserta didik dengan umur 4(empat) hingga dengan 6(enam) tahun dalam pendidikan anak usia dini, dan peserta didik kelas I, kelas II, kelas IV, kelas V, kelas VII, kelas VIII, kelas X, serta kelas XI dalam tahapan pendidikan dasar serta pendidikan menengah; dan

3) Tahun ketiga dilaksanakan untuk peserta didik dengan umur 3(tiga) hingga dengan 6(enam) tahun dalam pendidikan anak usia dini, dan peserta didik kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV, kelas V, kelas VI, kelas VII, kelas VIII, kelas IX, kelas X, kelas XI, serta kelas XII dalam tahapan pendidikan dasar serta pendidikan menengah.

Pelaksanaan prinsip pada prioritas sistem pendidikan dalam penyelenggaraan kebijakan Mendikbudristek No. 56 tahun 2022, dengan mempertimbangkan kondisi proses pembelajaran di sekolah. Meskipun pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah cukup efektif, namun masih ditemukannya beberapa kendala di lapangan yang dirasakan baik oleh guru, siswa, dan orang tua. Pembelajaran tatap muka sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kendala di lapangan yang dirasakan baik oleh guru, siswa dan orang tua.

Tujuan kurikulum merdeka selanjutnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan

kompetensi peserta didik pada fasenya. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

Pelaksanaan kebijakan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum di SDN Wonorejo 274 Surabaya yang sudah sudah cukup optimal, tetapi perlu ada tambahan di beberapa aspek. Hal ini dapat dilihat dari seluruh variabel dalam pelaksanaan yaitu standar, tujuan, dan kegiatan; sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya peralatan/sarana prasarana); komunikasi antar organisasi dan kegiatan; karakteristik dari lembaga; kondisi politik, sosial dan ekonomi; serta sikap pelaksana.

Hambatan yang dialami pada penerapan kurikulum merdeka belajar merupakan hambatan pada guru berupa komunikasi yang terjalin antar guru, orang tua dan siswa. Kendala pada orang tua berupa tingkat pendidikan siswa SDN Wonorejo 274 Surabaya yang sebelumnya tidak memasuki taman kanak-kanak, yang menyebabkan siswa dan guru kelas harus meraba bahwa ada beberapa yang tidak paham dalam hal membaca, menulis dan berhitung. Pelaksanaan kebijakan Pendidikan terkendala pada orang tua yang kurang cukup dalam menguasai teknologi informasi, sehingga berpengaruh pada siswa dan pada proses pembelajaran terutama dalam mencukupi kebutuhan belajar siswa.

Selanjutnya di bawah ini ditemukan beberapa hal atas pelaksanaan kurikulum merdeka belajar jika ditinjau dari perspektif Van Meter Van Horn:

Standar, tujuan & kegiatan

Adanya suatu kebijakan dikerjakan bersumber pada tujuan atau sasaran yang akan tercapai. Karena kebijakan yang baik wajib memiliki tujuan yang baik. Tujuan yang baik yaitu tujuan yang dapat tercapai dan disetujui oleh banyaknya orang serta tidak memberatkan yang akan menjalaninya, tujuan yang baik juga memiliki gambaran yang jelas dan langkah-langkahnya juga dimengerti untuk mencapai suatu tujuan.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi No. 56 Tahun 2022 pedoman pelaksanaan kurikulum sehubungan dengan pemulihan pendidikan, dengan satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan, kurikulum harus dikembangkan berdasarkan prinsip diversifikasi tahun 2022 dan memperhatikan keadaan satuan pendidikan, siswa dan potensi daerah. Dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, kurikulum mandiri pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan seluruh jenjang menengah atas diperhitungkan.

Belajar dengan kurikulum mandiri adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana pemikiran kritis dapat dikembangkan secara interaktif saat belajar. Pembelajaran ini dapat meningkatkan berpikir kritis siswa dan mendorong perilaku yang mencerminkan profil siswa Pancasila. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa pembelajaran harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Kepala SDN Wonorejo 274 Surabaya, tujuan dari praktik ini sangat jelas dan para guru memahaminya. Guru setuju untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang ada yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena ada kebijakan baru dimana mahasiswa harus menyesuaikan proses pembelajaran dan kebijakan ini dibuat untuk fokus pada pembelajaran pasca pandemi dimana mahasiswa belajar menggunakan sistem online. Guru juga memahami dengan jelas bahwa tujuan dari kebijakan pendidikan kurikulum mandiri adalah SDN Wonorejo 274 Surabaya Wakil Direktur Bidang Standar Pendidikan, yang mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai keberhasilan dan mencapai standar dalam proses pendidikan.

Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan ini sudah dapat dilakukan di SDN Wonorejo 274 karena para guru sudah memahami tujuan Permendikbud Nomor

56/2022 Menurut teori Van Meter Van Horn tujuan adalah tujuan tetap dan rencana juga dapat menerapkan kebijakan. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa tujuan sudah jelas dan pelaksana memahaminya serta melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumberdaya sendiri meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pelatihan adalah salah satu aspek terpenting yang menjamin kualitas kegiatan pribadi, sehingga pelatihan memiliki sistem kreatif pribadi, yang tujuannya adalah kegiatan yang sistematis dan terorganisir yang berkaitan dengan pengembangan pribadi siswa. Sekolah adalah lembaga pendidikan resmi. Sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah seluruh guru sekolah, siswa dan orang tua siswa di SDN Wonorejo 274 Surabaya. Kepala Sekolah Reny SDN Wonorejo 274 Surabaya mengatakan, seluruh guru mengikuti sosialisasi melalui webinar dan *step by step*. Ini bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi guru, kepala sekolah dan lembaga pendidikan. Pembelajaran orang-orang kunci ini penting karena pembelajaran ini merupakan dasar dari perubahan pendidikan yang diinginkan.

Pada informan kedua, Eri yang merupakan guru kelas 5 menyatakan bahwa dalam kurikulum mandiri ini, siswa diajarkan untuk berpikir kreatif, dan peran guru bersama dengan mengajar dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif.

Guru belajar bahwa kebutuhan siswa berbeda, guru ingin semua orang berinovasi di sini, itu adalah prioritas bagi semua guru untuk memahami apa itu kurikulum mandiri, menyesuaikan dengan pembelajaran di kelas dan secara tidak langsung mengubah Pendidikan, sistem, menyesuaikan dan menyesuaikan dengan buku teks yang ada dan mengajar siswa yang kreatif dan aktif dalam kurikulum mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara, Reny dan Eri menegaskan bahwa SDN Wonorejo 274 Surabaya mampu menerapkan kurikulum mandiri. Setiap tahapan implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang ditentukan secara apolitis. Selain sumber daya manusia, menurut teori studi indikatif parsial yang diberikan oleh Van Meter Van Horn, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia tidak terdapat batasnya, sebab guru sudah mempunyai kualifikasi yang mencukupi serta sebagian guru pula memiliki inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, agar pembelajaran berjalan dengan lancar.

2) Sumber Daya Finansial

Sumber daya keuangan dan waktu adalah penentu penting keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya politik tidak sepenting komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia untuk mempercepat implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari dana atau insentif lain yang dapat memfasilitasi implementasi kebijakan. Kurangnya atau keterbatasan sumber daya keuangan atau insentif lain untuk implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam kegagalan implementasi kebijakan.

Dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan tersebut, diperlukan lebih banyak sumber daya untuk mendukung kegiatan, agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dibandingkan dengan indikator sumber daya keuangan yang mendukung proses pembelajaran. Reny menyatakan bahwa penggunaan keuangan untuk "adhiyaya" adalah program yang dibuat untuk mengembangkan standar inti seperti kohesi, keterbukaan, kesetaraan, kewajaran, keadilan, dan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Di sana, sampah daun diubah menjadi kompos, dan botol minuman, kardus, dan minyak yang

dikumpulkan siswa didaur ulang. Selain itu, akan ada kegiatan pembangunan kebun sayur dan fasilitas budidaya, setelah panen kami akan membuka pameran materi pendidikan serta penggunaan dana tersebut untuk peningkatan program.

Siswa yang peduli dan berbudaya ekologis serta memiliki program nyata untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan penggunaan sumber daya operasional sekolah dengan menekan serta mengurangi konsumsi bermacam sumber daya serta energi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran, perusakan dan perlindungan fungsi lingkungan sekolah. Dijelaskan Reny selaku pengelola SDN Wonorejo 274 Surabaya, ia menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan dana anggaran untuk peningkatan infrastruktur yang diperlukan untuk proses belajar mengajar. Kegiatan pendidikan di sekolah didukung oleh APBN, dan sebagian anggaran dihabiskan untuk perbaikan komputer dan perlengkapan laboratorium.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, bahwa program "Adiwiyata" mewujudkan warga sekolah yang lebih peduli lingkungan dan berbudaya. Selain itu, Sekolah Adiwiyata berupaya agar warga sekolah lebih sadar akan lingkungannya untuk mencapai upaya pelestarian lingkungan, dan sebagian besar dana digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di SDN Wonorejo 274 Surabaya. Indikator keuangan berupa dana pemerintah cukup untuk mengimplementasikan kebijakan SDN Wonorejo 274 Surabaya.

Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan publik secara efektif, individu (pelaksana) harus memahami apa tujuan standarnya. Mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan standar dan tujuan kebijakan, sehingga standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Harus ada informasi yang konsisten dan konsisten dari berbagai sumber sebagai bagian dari mengkomunikasikan informasi tentang standar dan tujuan kepada pelaksana kebijakan. Kepala Sekolah SDN Wonorejo 274 Surabaya menyatakan komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Komunikasi di SDN Wonorejo 274 ini dilakukan melalui grup whatsapp, dan jika ada informasi dari kebijakan pendidikan, kepala sekolah menginformasikan bersama dengan guru kelas bahwa ada informasi pembelajaran terbaru. Kemudian kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di sekolah untuk ditindaklanjuti.

Guru SDN Wonorejo 274 Surabaya menyatakan bahwa komunikasi dengan orang tua siswa berjalan dengan baik karena grup WA mampu menyampaikan informasi pembelajaran terkini dan tugas yang perlu diketahui orang tua. Bu Dina bekerja sebagai wali kelas kelas 2 SDN Wonorejo 274 Surabaya.

Saat berkomunikasi dengan orang tua siswa di grup WA bersama orang tua sehingga ada tugas, informasi tentang pembelajaran diberikan langsung kepada orang tua, dan dengan bantuan grup ini, orang tua dapat mengetahui tugas apa yang dibutuhkan dan bantuan orang tua agar siswa siap menyelesaikan tugas.

Menurut orang tua siswa, komunikasi dilakukan melalui grup WA, di mana orang tua mendapat informasi tentang pembelajaran dan dapat menginformasikan kepada guru ke rumah bahwa mereka tidak dapat hadir di kelas karena sakit. Pernyataan tersebut disampaikan Maulana selaku orang tua siswa kelas 2 B SDN Wonorejo 274 Surabaya.

Komunikasi dengan guru ke rumah berjalan lancar melalui grup WA. Para orang tua dapat segera menginformasikan bahwa ada kesulitan dalam memahami pelajaran dan meminta izin untuk tidak mengikuti pelajaran jika anak sakit.

Dari hasil wawancara di atas tentang pentingnya komunikasi antara orang tua dan SDN Wonorejo untuk kemajuan belajar siswa, terlihat bahwa banyak orang tua yang memonitor

perkembangan belajarnya. Hambatan komunikasi ini masih orang tua yang kurang peka saat berkomunikasi dengan pengajar ke rumah dan guru.

Dengan demikian, kemungkinan pelaksanaan kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan. Selanjutnya, koordinasi merupakan mekanisme yang efektif untuk pelaksanaan kebijakan. Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan terkoordinasi, semakin kecil kesalahannya dan sebaliknya.

Karakteristik Lembaga

Lembaga pelaksana fokus pada organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting karena efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dengan karakteristik lembaga pelaksana. Hal ini mengacu pada kebijakan yang diterapkan dalam beberapa kebijakan yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang tegas dan disiplin. Dalam konteks lain, diperlukan pelaksana yang demokratis dan meyakinkan. Selain itu, ruang lingkup atau ukuran lapangan penting untuk menentukan kewenangan pelaksana kebijakan. Ciri lembaga pendidikan antara lain kompetensi guru untuk membawakan pembelajaran kepada siswa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Kepala Sekolah, Reny, SDN Wonorejo 274 Surabaya. Di SDN Wonorejo pengelolaan kelembagaan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan tugas disesuaikan dengan sumber daya manusia SDN Wonorejo.

Menurut wakil kepala sekolah Kurikulum Ninuk, guru-guru SDN Wonorejo 274 Surabaya telah memenuhi persyaratan belajar mengajar yang baik untuk menerapkan kurikulum baru setelah pengenalan pembelajaran daring, dan mereka dapat mengikuti program mandiri. pelajaran kurikulum. Dalam wawancara ini disimpulkan bahwa fasilitas sudah baik, dalam hal SDN Wonorejo 274 Surabaya berjalan dengan baik dan konsisten sehingga kegiatan dan pembelajaran berjalan dengan baik.

Kondisi politik, sosial dan ekonomi

Di samping itu, ketika mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, seseorang harus mempertimbangkan sejauh mana pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan dapat menjadi sumber masalah akibat kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang kondusif.

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kepada SDN Wonorejo sarana dan prasarana berupa komputer untuk menunjang kegiatan dan ujian akhir serta ujian bagi kelas 5 dan 6.

Eri, wali kelas 4 menyatakan, bahwa fasilitas dan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pembelajaran, dan pemerintah telah memberikan uang kepada sekolah untuk membuat program yang bermanfaat. Tujuan dari pembelajaran kurikulum mandiri adalah agar siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Sebagai guru, mereka juga melakukan dan mempraktekkan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan siswa.

Dalam kondisi yang berkaitan dengan masyarakat selalu mengalami perubahan melalui proses sosial, di mana proses sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial. Risky selaku wali kelas 1B menyatakan bahwa lingkungan sosial para siswa ini mempengaruhi proses pembelajaran, terutama bagi siswa kelas satu yang masih baru satu sama lain dan masih menyesuaikan diri di sekolah dasar.

Permasalahan keuangan siswa, ini didasarkan pada pekerjaan orang tua dan sekolah berupaya untuk menciptakan lingkungan siswa yang menyenangkan. Para orang tua siswa selalu mengingatkan mereka untuk belajar dan mengajar sebaik mungkin, dan kami selalu memberikan bimbingan untuk belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Hasil beberapa wawancara dengan guru menunjukkan bahwa kondisi politik, sosial dan ekonomi yang kurang kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, ketika menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan, seseorang harus memperhatikan keadaan lingkungan eksternal yang menguntungkan.

Kondisi politik, sosial dan ekonomi menjadi hal terakhir yang menjadi pertimbangan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan SDN Wonorejo 274 Surabaya, seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan dapat menjadi sumber masalah akibat kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang kondusif.

Faktor penghambat di SDN Wonorejo 274 adalah siswa kelas 1 yang masih menyesuaikan diri dengan teman yang lain karena sebagian siswa tidak bersekolah di Taman Kanak-Kanak, sehingga siswa tersebut tidak mendapatkan pelajaran yang sama dengan siswa lainnya.

Sikap pelaksana

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang politik dan bagaimana mereka melihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Pandangan bahwa implementasi kebijakan dimulai dengan terlebih dahulu menyaring persepsi para pelaksana tentang batasan-batasan di mana kebijakan dilaksanakan. Kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tiga jenis elemen respon, pertama terdiri dari pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman kebijakan (*understanding and understanding*), dan kedua, arah respon. penerimaan, netralitas atau penolakan (*acceptance, neutrality and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan. Memahami tujuan umum dan tujuan kebijakan dari standar itu penting. Karena pada akhirnya implementasi kebijakan yang sukses bisa saja gagal jika pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui standar dan tujuan kebijakan. Pelaksana mungkin gagal untuk melaksanakan kebijakan karena mereka menolak tujuan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini sikap pelaksana meliputi reaksi atau respon yaitu kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa terhadap kebijakan kurikulum mandiri pemerintah untuk menghidupkan kembali pembelajaran akibat virus corona. Jawaban para guru menunjukkan bahwa mereka selalu berusaha memberikan materi kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti yang dikatakan Eri selaku wali kelas kelas 4 SDN Wonorejo 274 Surabaya. Eri mencoba beradaptasi sambil menerapkan kebijakan rencana studi mandiri. Khusus untuk kelas 4 yang sampai saat ini menggunakan kurikulum K13 sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian secara bertahap dan saya usahakan agar lebih menarik, agar anak tidak mudah bosan dan bingung.

Pada awal perubahan kurikulum ini, diusulkan agar isi kurikulum mandiri harus dipahami dengan baik sebelum diperkenalkan. Menurut kepala sekolah Reny menyatakan bahwa mengetahui tentang kebijakan pendidikan yang baru, yaitu tentang perubahan kurikulum, langsung mengarahkan ke guru untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan siswa, apakah tepat untuk segera mengikuti kebijakan ini atau menunggu perubahan dalam proses pengajaran terlebih dahulu, tetapi setuju dengan guru untuk mengikuti dan menyesuaikan kebijakan yang diterapkan di SDN Wonorejo 274 Surabaya.

Oleh karena itu, orang tua hendaknya dapat mengarahkan siswa untuk belajar di rumah bersama guru. Nurul selaku wali siswa kelas 1A di SDN Wonorejo 274 Surabaya menyatakan bahwa perubahan kurikulum ini sangat baik, dan perubahan ini dulu sekolah *offline*. Sekolah online banyak kuota dan menggunakan program untuk tugas, saya disarankan untuk melakukan ini dan ia tidak mengerti. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak bisa pembelajaran pasca covid-19 sangat baik dan terus mendorong anaknya agar giat belajar, dan

baik untuk berpikir lebih kritis dan kreatif tentang tujuan kebijakan ibu mandiri dalam proyek pendidikan. Ia tidak khawatir belajar, bisa tanya langsung ke guru.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa di antara mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, standar dan tujuan kebijakan diterima secara luas dan mendalam. Intensitas sikap pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (efektivitas). Ketiadaan atau keterbatasan intensitas arah ini menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Di SDN Wonorejo 274 Surabaya, pelaksanaan Kebijakan Mendikbudristek No. 56 Tahun 2022 berjalan dengan baik dan didukung oleh kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan dan efektifitas proses pelaksanaan kebijakan di SDN Wonorejo 274 Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan kurikulum merdeka belajar yang dituangkan dalam Kebijakan Mendikbudristek Nomor 56 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, di SDN Wonorejo 274 Surabaya, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program relatif belum tercapai secara penuh, namun telah merubah perilaku para aktor pemangku kepentingan. Hal ini terutama dapat dilihat kinerja kepala sekolah termasuk Wakil Kepala Sekolah dan guru, namun demikian tidak terjadi terhadap sasaran siswa, masih belum mengadaptasi dengan kebijakan merdeka belajar ini, termasuk orang tua siswa.
2. Pelaksanaan sosialisasi program telah menyampaikan kebijakan kurikulum merdeka belajar secara efektif. Penyampaian informasi tentang kurikulum merdeka belajar juga dilakukan pendampingan oleh kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah terhadap guru dan siswa. telah dilaksanakan dengan baik.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka belajar telah ditetapkan oleh pihak sekolah tentang tujuan program dalam bentuk Buku Panduan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar, secara konsisten sesuai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pemantauan terhadap pelaksanaan dilakukan secara periodik setiap tri wulan atau tiga bulan sekali, bersamaan dengan persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Hasil pemantauan ini telah dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program kurikulum merdeka belajar. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ada kendala terutama ada beberapa guru yang masih memberikan pokok bahasan pada saat sebelum Covid 19 atau dalam kondisi normal, sehingga para siswa akhirnya juga belum dapat menyesuaikan, karena terlanjur atau terbiasa mengikuti proses belajar mengajar secara daring (*online*).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT : Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Dewi, L., & Astuti, N. P. E. (2022). Hambatan Kurikulum Merdeka Di Kelas Iv Sdn 3 Apuan. *Jurnal Pendidikan Dasar ...*, 4(2), 31–39.
<https://jurnal.markandeyabali.ac.id/index.php/rarepustaka/article/view/128>
- Muamar, Ruslan, Syarifuddin, & Ahmad. (2022). Evaluasi Proses Pembelajaran PAI Dalam

Kurikulum Merdeka Di SMA Negeri 4 Kota Bima 1Muamar,. *TADARUS: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 29–41.

Nasution, K., & Syukri, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Madrasah Alkiyah Al Huda pangkalan Susu. *Al Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, V(1), 144–156.

Sari, R. M. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 38–50. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3326>

Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., & Prihantini, A. H. H. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 6(5), 8248–8258. <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>